



KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
NOMOR : 19/Kpts/OT.210/H.4/01/2026**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
 - b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK, WBBM, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja / Satuan Pelaksana.
 - c. bahwa untuk membentuk Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP;
10. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 08 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan TA 2026 Nomor SP. DIPA-018.09.2.237291/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang baru, pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dengan susunan keanggotaan dan pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim kerja bertugas mulai ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dan dapat diperpanjang sampai dengan selesainya proses penilaian oleh Kementerian/Lembaga terkait.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan TA 2026.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 21 Januari 2026



Kepala Pusat,

KETUT KARIYASA ✍

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta,
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor,
5. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian lingkup BRMP Perkebunan;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Perkebunan

Nomor : 19/Kpts/OT.210/H.4/01/2026
Tanggal : 21 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si 196904191998031002	Kepala BRMP Perkebunan	Penanggung Jawab
2.	Muh. Imran Ibrahim, SE., M.AP 197710172009121002	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Raden Dani Medionovianto, S.Pt., MAP. 196911191990021001	Ketua Kelompok Kerja Program dan Evaluasi/Penyuluh Ahli Madya	Wakil Ketua
Tim Area Manajemen Perubahan			
4.	Ema Komalasari, SP., MP. 198101192011012007	Ketua Tim Kerja SDM/PBT Ahli Pertama	Penanggung Jawab Area
5.	Putri Wulan Adiningrum, A.Md., S.T 198902142015032003	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
6.	Zahrani Muzakki, S.Tr.Kom 199610312015051001	Pranata Humas Pertama	Anggota
7.	Dara Fakhira Dwimareta, S.P 200003262025052006	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
Tim Penataan Tatalaksana			
8.	Bursatriannyo, S.Komp. 196810251992031001	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN/Pranata Komputer Ahli Muda	Penanggung Jawab Area
9.	Nurya Yuniyati, S.P., M.Si 198206282006042001	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan R.T./Analisis APK APBN Ahli Muda	Anggota
10.	Arif Wicaksono, S.E 199411242025051004	Analisis APK APBN Ahli Pertama	Anggota
11.	Gusti Yasfin Havest Al-Qindi, S.Kom 200010182025051004	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
12.	Syifa Nurul Shofwaty, S.Kom 199603082020121004	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
13.	Ghozy Nabil Harits, S.P 199811112025051003	PBT Ahli Pertama	Anggota
14.	Lia Anggraini, S.I.Kom 198803152018012001	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
Tim Penataan Sistem Manajemen SDM			
15.	Yusuf Supriadi, A.Md. 196909251992031002	Pranata SDM Aparatur Penyelia	Penanggung Jawab Area
16.	Rizqi Firdaus, S.M. 199706012023211006	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
17.	Indra Rukmana, S.A.P 198902052024211007	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
18.	Meirlyn Henritami Three Putri Jaya Wardani, S.E 199605092025212047	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota

Tim Penguatan Akuntabilitas			
19.	Ilham Nur Ardhi W. SP., M.Si 198001212008011015	Ketua Tim Kerja Program/PBT Ahli Muda	Penanggung Jawab Area
20.	Nugroho Utomo 198811302015031002	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
21.	Rusli Hidayat, S.Kom 198801122025211009	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
22.	Faradila Danasworo Putri, S.P., M.Si 199003032022032001	Ketua Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian/ Asta Ahli Pertama	Anggota
Tim Penguatan Pengawasan			
23.	Yulinar Firdaus, ST. 199707282020122005	Ketua Kelompok Kerja Evaluasi dan Pelaporan/Perencana Ahli Pertama	Penanggung Jawab Area
24.	Esih Sukaesih 197507232006042029	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
25.	Evi Maulana 197304282007011001	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
26.	Linda Trivana, S.Si., M.Si 199005252014032004	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
27.	Iva Fitriani, S.P 199310142025212058	PMHP Ahli Pertama	Anggota
Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
28.	Raden Hera Nurhayati, SP 197402202001122001	Ketua Kelompok Kerja PHS/Asta Ahli Muda	Penanggung Jawab Area
29.	Indah Kurniasari, SP., M.Sc. 199001012019022004	Ketua Tim Kerja PHS/ PMHP Ahli Pertama	Anggota
30.	Erriani Kristiyaningsih, S.Sos., M.Si 197709282011012003	Ketua Tim Kerja Sinergi PHS/ Pustakawan Ahli Muda	Anggota
31.	Andriana Kartikawati, S.P, M.Agr 198703112014032001	Ketu Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama/Asta Ahli Pertama	Anggota
32.	Anwar Pasaribu, S.Tr.P 199603082020121004	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota
33.	Irma Supaningsih 199709302025212014	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
34.	Amaliatus Sholihah 200006232025212006	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
35.	Risma Damayanti, A.Md 199110122022032001	Pengawas Benih Tanaman Terampil	Anggota
36.	Herlina Saragih 197207102006042028	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Uraian Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari KoruPRMP (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) PRMP Perkebunan Tahun 2026

Penanggung jawab:

Memberikan arahan seluruh rangkaian penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Ketua dan wakil:

1. Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan PRMP Perkebunan.
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan PRMP Perkebunan dengan masing-masing koordinator dan anggota sesuai dengan tanggung jawab terhadap aspek komponen pengungkit pembangunan ZI.
3. Melakukan pengendalian dan penyelenggaraan rapat monitoring dan evaluasi pembangunan ZI di PRMP Perkebunan.
4. Melaporkan penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di PRMP Perkebunan.

Penanggung Jawab Area dan Anggota Memiliki Tugas:

Tugas umum masing-masing area:

1. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan BRMP Perkebunan.
2. Menyiapkan dokumen bukti fisik sesuai dengan area perubahan yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.
3. Melakukan inovasi pada area perubahan yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan BRMP Perkebunan.

Tugas khusus masing-masing area:

1. Area I (manajemen Perubahan):
Mentransformasi system dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan Masyarakat yang semakin meningkat.
2. Area II (Penataan Tatalaksanaan):
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, prosedur, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.
3. Area III (Penataan Sistem Manajemen SDM):
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4. Area IV (Penguatan Akuntabilitas):
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja PRMP Perkebunan
5. Area V (Penguatan Pengawasan):
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi, dan nepotisme di PRMP Perkebunan.
6. Area VI (peningkatan kualitas pelayanan publik):
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di BRMP Perkebunan.

Kepala Pusat,



KETUT KARIYASA